

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini akan membahas dan mengkaji tentang demokrasi di Thailand yang menghadapi banyak sekali hambatan menuju konsolidasi demokrasi. Joseph Schumpeter merumuskan bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik yaitu sebuah sistem dan mekanisme dalam memilih pemimpin politik.<sup>1</sup> Sedangkan demokratisasi adalah sebuah perjalanan suatu negara menuju sistem demokrasi.

Pada akhir dekade ini demokratisasi telah menjadi isu yang hangat di dunia, satu persatu negara di dunia melakukan demokratisasi. Thailand adalah salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam masa demokratisasinya. Dimulai pada tahun 1932, ini adalah momen kudeta yang berdarah. Peristiwa yang juga dikenal sebagai revolusi Siam tersebut adalah momen titik balik dalam sejarah Thailand. Pelakunya adalah sekelompok anggota militer yang disebut sebagai 'four musketeers' melengserkan raja Prajadhipok. Aksi ini membuat sistem monarki absolut tidak berlaku lagi. Ke depannya, Thailand menjadi negara dengan sistem monarki konstitusional.<sup>2</sup>

Kudeta pertama itu menjadi titik awal dari perjalanan panjang masa transisi demokrasi di Thailand. Sejak saat itu, pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan selama beberapa dekade. Selama penguasaan atau masa pemerintahan junta militer tersebut terjadi beberapa kali perebutan kekuasaan di tubuh militer itu sendiri. Hingga pada tahun 1977

---

<sup>1</sup> Sorensen, george. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003.Hlm 14

<sup>2</sup> news.detik.com/read/2014/05/23/150138/2590861/1148/2/thailand-dan-sejarah-panjang-11-kali-kudeta-militer.

kelompok mahasiswa dan pihak sipil berhasil menjatuhkan kekuasaan junta militer. Dalam pemerintahan parlementer waktu itu memiliki tujuan untuk membangun demokrasi ditunjukkan dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik, bahkan partai politik telah memiliki legitimasi. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer.

Pemerintahan parlementer bertahan hampir 12 tahun, Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Hingga sekarang kondisi politik di Thailand terus berkecamuk dan terjadi beberapa kali junta militer.<sup>3</sup>

Pada tahun 2001 Thailand kembali memasuki masa demokrasi, yaitu masa pemerintahan Thaksin Shinawatra dan berkuasanya partai Thai Rak Thai. Namun pada tahun 2006 militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan Thaksin.

Pada tanggal 19 september 2006, Thaksin Shinawatra perdanamenteri Thailand telah digulingkan oleh junta militer. Ironisnya kudeta tersebut terjadi ketika Thaksin sedang tidak berada di Thailand. Saat terjadi kudeta Thaksin sedang di New York Amerika Serikat, sedang menghadiri sebuah pertemuan PBB. Kudeta oleh militer bukan kali pertamanya di Thailand, meskipun begitu kudeta kali ini terjadi tanpa adanya pertumpahan darah.<sup>4</sup>

Kudeta terjadi pada pemerintahan Thaksin pada tanggal 19 september 2006 didalangi oleh militer atau dikenal sebagai dewan keamanan nasional CNS (Council for National Security) tanpa adanya pertumpahan darah, dan waktu itu Thaksin tidak ada di Thailand karena sedang menghadiri pertemuan PBB di New York. Pada waktu itu pemerintahan yang baru (junta militer) langsung membentuk AEC (Assets Examination Committe) untuk

---

<sup>3</sup> Diambil dari [m.detik.com/news/read/2014/05/23/150138/2590861/1140/](http://m.detik.com/news/read/2014/05/23/150138/2590861/1140/)

<sup>4</sup> Diambil dari [www.matthaba.net/0\\_index.shtml?x=604493](http://www.matthaba.net/0_index.shtml?x=604493)

membekukan semua aset yang dimiliki oleh Thaksin. Thaksin disebut-sebut memiliki aset kekayaan yang tidak wajar selama menjadi perdana menteri Thailand. Jalan militer kembali ditempuh dalam pergantian kepemimpinan di Thailand, hal ini menunjukkan kegagalan proses demokrasi Thailand.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan struktural, demokrasi adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus . Oleh karena itu, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada ‘penyelesaian’ dalam bentuk kesepakatan. Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.<sup>5</sup>

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah, atau daulat raja. Dalam penjelasan yang lain, demokrasi dapat pula diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Melihat batasan di atas, tidak salah apabila demokrasi diartikan

---

<sup>5</sup> Alfian, 1986, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Jakarta: Gramedia. Hlm 228

sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pendapat umum.

Thailand adalah negara yang sedang dalam proses untuk menjadi negara yang demokrasi dan sedang dalam masa transisi demokrasi atau demokratisasi. Pada dasarnya demokratisasi pada tingkatan yang sederhana mencakup (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) dibangunnya sebuah rezim demokrasi, (3) konsolidasi.<sup>6</sup> Artinya demokratisasi berarti Proses perubahan rezim otoritarian (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang memberi derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi Usasi yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Sebuah pemerintahan demokrasi diawali dengan runtuhnya rezim non-demokrasi, kemudian membangun pemerintahan yang demokrasi. Tahap terakhir dalam proses demokrasi adalah tercapainya konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi adalah keadaan dimana suatu Negara sudah benar-benar menerapkan demokrasi didalam segala aspek kehidupan bernegara.

Thailand memulai perjalanan demokrasinya pada tahun 1932, saat itu terjadi revolusi sosial yang selanjutnya mengubah konstitusi di Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, walaupun kemudian kekuasaan dipegang oleh militer.

Militer menguasai Thailand cukup lama, dan selama itu pula kerap kali terjadi pergantian kekuasaan, namun masih dalam lingkup militer itu sendiri. Pada tahun 1947, terjadi kudeta pada pemerintahan Thailand. Kudeta ini dilakukan dengan tujuan agar para

---

<sup>6</sup> Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta Grafiti, , 1991. Hlm 44

<sup>7</sup> Dahl, Robert A. *Democracy and its Critics*. New Heaven : Yale University Press,1989. Hlm 58

petinggi militer lainnya mendapatkan jabatan senior di pemerintahan. Namun, setelah kudeta tersebut, terjadi perpecahan di dalam tubuh angkatan bersenjata itu sendiri karena terjadi perebutan kekuasaan. Meskipun begitu, dominasi politik dalam pemerintahan oleh militer tidaklah tergoyahkan.<sup>8</sup>

Pada tahun 1957, Panglima Sarit menggulingkan Panglima Tertinggi Pibul, Phin, dan Jendral Polisi Phao, setelah itu melakukan kudeta pada tahun 1958. Sarit melakukan kudeta tersebut dengan tipe konservatisme dan kapitalisme. Pemerintahan militer pun menjadi semakin menguat setelah kudeta yang dilakukan oleh Sarit. Setelah kudeta kedua terjadi di tahun yang sama, Sarit sadar bahwa ketidakstabilan politik terjadi karena angkatan bersenjata tidak memiliki kekompakan. Sebuah ideologi yang dibutuhkan untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata dan membuat perubahan politik. Tanggapan Sarit adalah konservatisme yang mengangkat prestise monarki, aturan birokrasi konsolidasi, dihapuskannya konstitusionalisme, dan kegiatan politik terbatas. Pada masa pemerintahannya, Sarit fokus membangun ekonomi Thailand, sehingga merugikan perkembangan pemerintahan demokrasi. Namun, ekonomi Thailand berkembang dengan pesat dan memperkuat sektor bisnisnya. Organisasi mahasiswa yang memimpin pemberontakan bersejarah pada tahun 1973 pun muncul akibat perluasan pendidikan yang dicanangkan sejak periode kekuasaan Sarit.

Hingga pada tahun 1977 kudeta dilakukan oleh sipil yang ditokohi oleh mahasiswa dan masyarakat kelas menengah kemudian diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Setelah kudeta tersebut, pemerintahan parlementer bertahan selama hampir 12 tahun. Partai politik mulai mendapat legitimasi. Komitmen masyarakat terhadap demokrasi mulai bangkit dan pihak militer mulai terkesan menerima kehadiran demokrasi.

---

<sup>8</sup>Diambil dari [www.THAILAND.com/forum/shothread.php?==24228](http://www.THAILAND.com/forum/shothread.php?==24228)

Dengan runtuhnya rezim militer dimulailah langkah demokrasi Thailand. Mengacu pada perkataan huntington, dalam pengertian yang sederhana demokrasi dimulai dengan runtuhnya suatu rezim non-demokrasi kemudian dibangunnya pemerintahan yang demokrasi dan akhirnya adalah tercapainya konsolidasi demokrasi.

Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Meskipun kudeta berhasil dilaksanakan, militer menghadapi masalah dalam mengatasi kekuatan demokrasi yang tengah berkembang dengan pesatnya. Para pihak yang mendukung demokrasi memaksa pemimpin kudeta untuk menyetujui konsesi.<sup>9</sup> Namun demikian, tidak bisa terelakan dari kenyataan bahwa demokrasi di Thailand telah diciderai dengan adanya kembali junta militer.<sup>10</sup>

Pada tahun 1992 terjadi gelombang yang besar dari masyarakat yang didukung oleh kelompok elit pembisnis untuk menyingkirkan militer dari kekuasaan dan menuntut pemerintahan yang demokrasi. Setelah melalui perjuangan yang berat dan berdarah akhirnya militer berhasil disingkirkan dari politik Thailand, dan sebuah konstitusi yang demokratis dan bersifat kerakyatan lahir pada tahun 1997. Sebuah harapan akan kehidupan yang demokrasi sudah tergambar jelas.

Pada tahun 2001 Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri pertama yang dipilih secara langsung oleh Rakyat. Namun pada tahun 2006 militer melakukan kudeta atas pemerintahan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Pada tanggal 19 september 2006, Thaksin Shinawatra perdana menteri Thailand telah digulingkan oleh junta militer. Ironisnya kudeta tersebut terjadi ketika Thaksin sedang tidak berada di Thailand. Saat terjadi kudeta Thaksin sedang di New York Amerika Serikat, sedang menghadiri sebuah pertemuan PBB. Kudeta

---

<sup>9</sup> Jumbala, Prudhisana, *Nation-Building and Democratization in Thailand : A Political History*. Bangkok : Chulalongkorn University, Social Research Institute, 1992. Hlm 86

<sup>10</sup> [www.politik.lipi.ggo.id/in/kolom/politik-intrnasional/361jalanpanjangdemokrasi-thailand-.html](http://www.politik.lipi.ggo.id/in/kolom/politik-intrnasional/361jalanpanjangdemokrasi-thailand-.html)

oleh militer bukan kali pertamanya di Thailand, meskipun begitu kudeta kali ini terjadi tanpa adanya pertumpahan darah.

Kudeta terjadi pada pemerintahan Thaksin pada tanggal 19 september 2006 didalangi oleh militer atau dikenal sebagai dewan keamanan nasional CNS (Council for National Security) tanpa adanya pertumpahan darah, dan waktu itu Thaksin tidak ada di Thailand karena sedang menghadiri pertemuan PBB di New York. Pada waktu itu pemerintahan yang baru (junta militer) langsung membentuk AEC (Assets Examination Committe) untuk membekukan semua aset yang dimiliki oleh Thaksin. Thaksin disebut-sebut memiliki aset kekayaan yang tidak wajar selama menjadi perdana menteri Thailand.

Selama masa pemerintahannya sebagai perdanamentri Thailand, Thaksin banyak mendapat kritikan mengenai pemerintahannya. Sebagian orang mengatakan Thaksin adalah seorang pembisnis sehingga seluruh kebijakan Thaksin selama ia memerintah hanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaannya sendiri. Bahkan disebutkan bahwa Thaksin telah menjual perusahaan negara kepada investor asing, dikatakan pula selama pemerintahannya Thaksin kerap melakukan nepotisme, ia sering mengangkat kerabat dekatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan.

Thaksin Shinawatra dan kelompok pendukungnya selama ini telah memenangkan pemelihan umum,. Hal itu menunjukkan Thaksin dan kelompoknya memiliki tempat di masyarakat Thailand.<sup>11</sup> Kemenangan yang diperoleh oleh Thaksin dan pengikutnya ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Thaksin yang membela kaum miskin di Thailand, sehingga saat pemilu masyarakat Thailand yang mayoritas adalah masyarakat kaum miskin akan mendukung Thaksin.

---

<sup>11</sup> [Thestar.com.m/news/story.asp?file=/2008/8/11/nation/20080811144918&sec=nation](http://Thestar.com.m/news/story.asp?file=/2008/8/11/nation/20080811144918&sec=nation)

Thaksin sangat populer dan disukai oleh kaum miskin dan kelas bawah di Thailand, namun sebagian besar masyarakat kelas menengah tidak menyukai Thaksin dikarenakan korupsi yang telah dilakukan oleh Thaksin. Di sisi lain, pihak kerajaan Thailand dan militer juga tidak menyukai Thaksin karena Thaksin mengancam dominasi dan kekuatan mereka pada politik di Thailand, terlebih karena sebagian besar masyarakat Thailand yang notabene adalah masyarakat kelas bawah menyukai dan mendukung Thaksin. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan Thaksin sangat membela masyarakat kelas bawah, seperti kebijakannya yang membuat pengangguran di Thailand berkurang dan Thaksin juga membuat biaya kesehatan di Thailand bisa dijangkau oleh kelas bawah.

Diketahui bahwa Thaksin kerap mendapat kritikan dari kelompok masyarakat menengah mengenai kebijakan-kebijakannya yang dianggap hanya menguntungkan kelompok dan keluarganya saja, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga dicintai kelompok masyarakat bawah karena kebijakannya yang memihak mereka. Kecintaan dan dukungan dari masyarakat kelompok bawah dibuktikan dengan kemenangan partainya pada pemilihan umum. Itu menunjukkan Thaksin memiliki tempat tersendiri pada masyarakat Thailand, dan memiliki banyak pendukung. Namun demikian pada tahun 2006 partai dan dirinya diturunkan dengan mudah dari pemerintahan oleh militer.

Sejak terjadi revolusi sosial pada tahun 1932 sudah terjadi 12 kali kudeta yang sukses dan 7 kali percobaan yang gagal, artinya dari tahun 1932 hingga sekarang sudah terjadi 19 kali aksi kudeta, jadi kurang lebih hampir setiap 6 tahun sekali terjadi kudeta di Thailand. Hal ini menunjukkan tidak setabilnya politik di Thailand, dan menunjukkan Thailand masih jauh dari konsolidasi demokrasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Di ambil dari [Indoprogres.com/2014/12/distrik-thai-potret-thailand-paska-kudeta-22-mei-2014/](http://Indoprogres.com/2014/12/distrik-thai-potret-thailand-paska-kudeta-22-mei-2014/). Dikutip dari D.G.L Hall, (1997). *A History of southeast Asia*, London: McMillan Limited

Hal yang menjadi perhatian penulis adalah gagalnya Thailand dalam mencapai tahap selanjutnya yaitu konsolidasi demokrasi. Seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa masyarakat Thailand telah susah payah melakukan perjuangan didalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Kemudian akhirnya berhasil melahirkan konstitusi yang demokratis pada tahun 1997 dan juga menyingkirkan militer dari politik, namun berikutnya pada tahun 2006 junta kembali pada politik dan kekuasaan di Thailand setelah melakukan kudeta atas pemerintahan Thaksin Shinawatra.

Siklus perjalanan demokrasi di Thailand yang memiliki banyak hambatan dan hanya berputar pada tahap pembangunan pemerintahan demokrasi kemudian kembali lagi pada pemerintahan yang non-demokrasi telah menarik perhatian penulis dalam mengangkat problematika dan hambatan konsolidasi demokrasi di Thailand.

### **C. Rumusan Masalah**

Didalam latar belakang telah dijelaskan mengenai masa transisi demokrasi yang ada di Thailand, yaitu ketidakstabilan politik dan masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi yang menemui jalan buntu, Sehingga dari latar belakang tersebut penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa konsolidasi demokrasi di Thailand banyak menemui hambatan?”

### **D. Kerangka Berpikir**

Konsolidasi Demokrasi

Sejarah kerajaan Thailand dan militernya yang sangat kental telah membudaya dan menggarap masyarakat Thailand. Sistem monarki di Thailand sejak tahun 1932 memang telah dirubah oleh revolusi yang dilakukan oleh militer sehingga konstitusi monarki absolut di Thailand saat itu menjadi monarki konstitusional, namun loyalitas masyarakat dengan kerajaan masih sangat kuat dan tentu saja hal itu menghambat berkembangnya demokrasi. Begitu pula dengan militer di Thailand yang dari tahun 1932 bahkan hingga sekarang masih kental dengan dunia politik dan masih memiliki rasa ambisi dan hak untuk memimpin Thailand, sehingga politik dan institusi di Thailand tidak berjalan dengan baik, hal itu juga menghambat berkembangnya demokrasi di Thailand. Begitu pula ketika diturunkannya Thaksin dari kepemimpinannya, militer dan anggota kerajaan merasa saat itu legalitas dan kekuasaannya berkurang dikarenakan oleh kekuasaan Thaksin dan partainya yang mulai mendapat tempat di masyarakat. Dikarenakan faktor seperti itulah sebenarnya Thaksin diurungkan dari kekuasaannya.

Konsolidasi demokrasi adalah kondisi dimana demokrasi dilihat sebagai “satu-satunya permainan dikota” (*the only game in town*). Artinya bahwa semua aktor negara, baik elit politik, ekonomi, maupun instansi negara hanya menggunakan cara-cara demokrasi dalam mencapai tujuannya kaitannya dengan perannya sebagai aktor-aktor negara.<sup>13</sup>

Konsolidasi demokrasi merupakan sebuah tujuan akhir didalam proses demokrasi. Diperlukan sebuah proses yang panjang dan kompleks dalam mencapai sebuah konsolidasi demokrasi. Perubahan suatu pemerintahan menuju demokrasi biasanya ditandai dengan sebuah krisis dan kemudian berakhirnya rezim yang non-demokrasi, yang kemudian dimulainya sebuah pemerintahan yang baru yang berasaskan demokrasi.

---

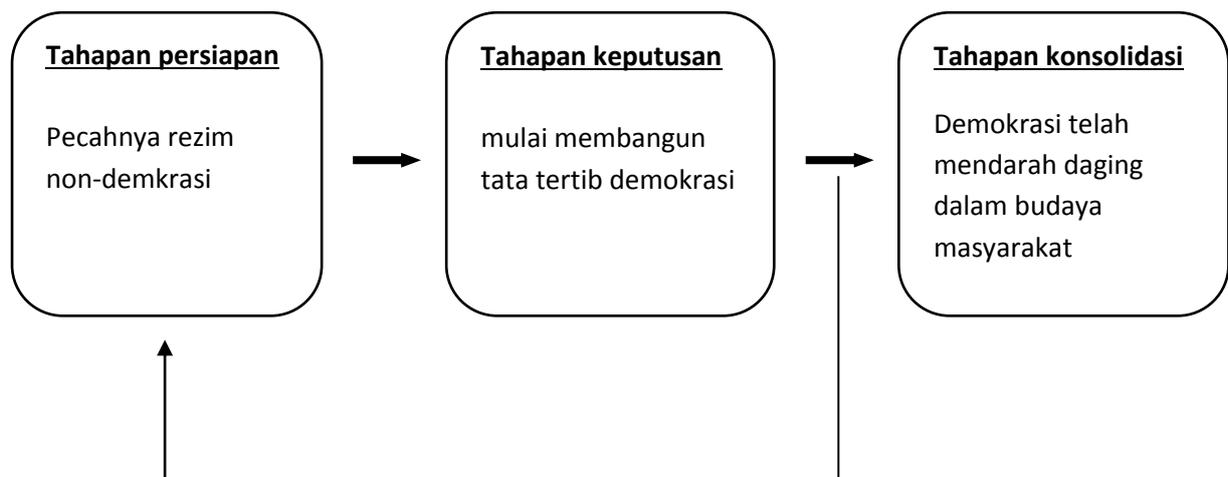
<sup>13</sup> Sorensen, George. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003. hlm 71

Namun dalam menuju konsolidasi demokrasi dibutuhkan lagi sebuah proses dalam mengkonsolidasikan demokrasi sehingga pada akhirnya demokrasi menjadi satu-satunya permainan yang ada di kota (*The only game in town*).<sup>14</sup>

Dankwart Rustow membuat sebuah model untuk menggambarkan proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Didalam modelnya Rustow menggambarkan proses konsolidasi demokrasi melalui tiga tahap yaitu tahapan persiapan, tahapan keputusan, tahapan konsolidasi.

Bagan 1.1

Tahapan konsolidasi demokrasi<sup>15</sup>



Sumber : data diolah oleh penulis berdasarkan buku demokrasi dan demokratisasi Georg Sorensen.

Seperti yang terlihat pada bagan diatas bahwa didalam proses konsolidasi seringkali terjadi tumpang tindih, artinya setelah melalui tahap kedua dan menuju ke tahap konsolidasi

<sup>14</sup> Ibid, hlm 71

<sup>15</sup> Ibid, hlm 75

demokrasi sering mengalami kemunduran dan kembali lagi pada pemerintahan yang non-demokrasi.

Proses didalam tahapan keputusan kerap kali menjadi faktor yang kuat didalam menentukan keberlangsungan menuju konsolidasi demokrasi. Terry Lynn Karl berpendapat bahwa sebenarnya aktor negara atau kekuatan pemerintah tradisional masih memegang kendali meskipun telah mendapat tekanan dari masyarakat.

“saat ini bagaimanapun, tidak ada demokrasi politik stabil yang dihasilkan dari transisi rezim dimana aktor-aktor massa memegang kendali, walaupun hanya sementara, atas kelas-kelas tradisional. Upaya-upaya revormasi dari bawah . . . berhadapan dengan perlawanan subversif dari elit-elit tradisional. . .<sup>16</sup>

Samuel P. Huntington merumuskan dan mengkategorikan faktor-faktor yang menghambat demokrasi menjadi tiga garis besar yaitu ;

- a. Politik, sebuah penghalang dibidang politik yang secara potensial signifikan terhadap perkembangan demokrasi adalah tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada negara-negara yang masih otoriter dan akan menjadi kaum konservatif yang dengan kerasnya menentang demokrasi.
- b. Budaya, tradisi budaya yang bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran norma-norma demokrasi didalam masyarakat, yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat kepada lembaga-lembaga demokrasi sehingga akan menghalangi munculnya dan berfungsinya institusi-institusi tersebut secara efektif.

---

<sup>16</sup> Sorensen, george. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003. Hlm 78

- c. Ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi disuatu negara, karenaitu demokrasi sangat bergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara.<sup>17</sup>

Thailand merupakan negara satu-satunya di asia tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, sehingga ketika negara lain yang dijajah mendapatkan warisan seperti sistem pemerintahan, Thailand harus membentuk dan membangun sistemnya sendiri. Hal ini juga yang menghambat demokrasi di Thailand, karena Thailand yang tidak mempunyai sejarah “terjajah” oleh bangsa barat harus menerka-nerka demokrasiya sendiri kaena tidak memiliki warisan model bentuk pemerintahan demokrasi.

Sebuah negara tidak akan bisa mencapai konsolidasi demokrasi apabila aktornya masih memiliki pandangan non-demokrasi. Militer dan monarki di Thailand memiliki pengaruh yang besar pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kekuatan tradisonal seperti militer dan monarki yang tidak memiliki pandangan demokrasi telah menjadi hambatan utama Thailand dalam menuju konsolidasi demokrasi, dan selama kekuatan tradisional tersebut masih memiliki pandangan non-demokrasi Thailand tidak akan pernah mencapai konsolidasi demokrasi.

Tanda dari tercapainya konsolidasi demokrasi apabila sudah tidak ada lagi aktor ekonomi, sosial, politik dan institusi yang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan non-demokrasi atau memisahkan diri dari negara. Ketika Masyarakat juga sudah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi, artinya meskipun masyarakat mengalami krisis dan kegagalan dalam pemerintahannya, namun masih percaya bahwa demokrasi merupakan satu-satunya jalan yang terbaik. Dan ketika kekuatan pemerintah maupun non pemerintah

---

<sup>17</sup> Samuel P. Huntington, “*Gelombang Demokratisasi Ketiga*”, Jakarta, Grafiti Press, 2000. Hlm. 381-404

menyelesaikan permasalahan yang tumbuh di masyarakat menggunakan hukum yang sesuai dengan aturan main didalam sistem demokrasi. Tanda dari tercapainya konsolidasi demokrasi juga dengan terisolirnya kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Kemudian Syarat untuk tercapainya konsolidasi demokrasi diantaranya adalah :<sup>18</sup>

- a. Masyarakat yang jelas, bebas dan dinamis
- b. Masyarakat politik yang otonom
- c. *State of law*
- d. Birokrasi yang efektif dan pro-demokrasi
- e. Masyarakat ekonomi yang terinstitusi

Dalam mencapai konsolidasi demokrasi, suatu negara harus memiliki kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan diatas. Salah satunya Thailand akan mencapai konsolidasi demokrasi apabila semua aktor negaranya sudah sepakat dan hanya memiliki pandangan demokrasi dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya.

Begitu pula dengan institusi di Thailand, dimana seharusnya Institusi yang merupakan representasi dari hukum dan konstitusi memiliki legalitas melebihi negara dan aktor-aktornya. Artinya sebuah negara demokrasi memiliki Institusi yang kuat dan memiliki fungsi sebagai pengatur permainan didalam negara suapaya tidak ada satu bagian negara maupun aktor yang melanggar ketentuan dari nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>18</sup> Sorensen, george. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003. Hlm 80

## E. Hipotesa

Dari kerangka berpikir penulis dapat menyimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi di Thailand gagal karena :

- a. Pertama, tidak adanya pengalaman demokrasi yang mendalam menyebabkan kekuatan elit yang berkuasa di dalam politik Thailand menjadi kaum konservatif yang menentang demokrasi.
- b. Kedua, lemahnya lembaga-lembaga demokrasi di Thailand menyebabkan institusi-institusi terkait tidak berfungsi secara efektif.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling dasar dalam melaksanakan suatu penelitian. Hadi menjelaskan bahwa metodologi ialah salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian ilmiah karena ketepatan penggunaan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *non statistic* yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disampaikan apa adanya, lalu dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang juga memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang

---

<sup>19</sup> Hadi S., *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 200), hal. 45

bersumber dari buku, majalah, surat kabar, situs internet serta catatan atau sumber informasi valid lainnya.

### **G. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam tentang problematika dan hambatan konsolidasi demokrasi di Thailand.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian disini ditujukan penulis untuk mempermudah penulis menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Didalam skripsi ini peneliti akan menggunakan data dari awal revolusi di Thailand yaitu pada tahun 1932 hingga pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra dan kudeta atas dirinya pada tahun 2006. Hal ini dilakukan penulis untuk melihat penyebab mengapa banyak hambatan Konsolidasi di Thailand.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi dipaparkan sebagai berikut :

Bab I : Bab satu berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : bab dua akan menjelaskan dan menerangkan tentang sejarah politik Thailand. Penulis akan menunjukkan data tentang sejarah politik thailand, bagaimana Thailand bisa

terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan warna dari Thailand yang sekarang yang terkait dengan proses demokrasi di Thailand.

Bab III: Bab tiga akan menerangkan siklus kudeta yang terjadi di Thailand dan. Dalam bab ini penulis akan menunjukkan fakta-fakta tentang kudeta yang terjadi di Thailand, tentang bagaimana kebijakan kebijakan pemimpin maupun bentuk pemerintahan serta institusinya, dan menunjukkan fakta-fakta terkait dengan pemicu mengapa dia di kudeta, sehingga dapat digunakan sebagai bahan studi kasus untuk menganalisa terkait dengan kegagalan proses demokrasi di Thailand.

Bab IV: dalam bab IV penulis akan menganalisa dan mengupas alasan mengapa konsolidasi demokrasi memiliki banyak hambatan sehingga konsolidasi demokrasi di Thailand tidak bisa tercapai bahkan didalam prosesnya Thailand mengalami kemunduran demokrasi.

Bab V : Bab lima berisi kesimpulan yang berisi poin- poin penting terkait jawaban atas rumusan masalah, mengapa proses konsolidasi demokrasi di Thailand mengalami kegagalan.